

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Inggris tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain dalam merumuskan kepentingan nasionalnya. Prioritas untuk menyejahterakan dan memberikan perlindungan keamanan terhadap warga negaranya praktis menjadi cita-cita yang sama bagi tiap negara. Pemerintah Inggris menyatakan bahwa kepentingan nasional Inggris akan dipromosikan oleh kemajuan enam tujuan strategis<sup>1</sup>: 1) masyarakat yang bebas dan demokratis dengan perlindungan yang baik dari musuh, 2) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kuat, 3) aktif, aman, dan kohesif secara sosial; bertanggung jawab secara sosial dengan populasi yang sehat dan berpendidikan, 4) perlakuan yang adil bagi mereka yang miskin atau rentan, 5) budaya yang dinamis, dan 6) lingkungan indah dan alami yang dibangun secara berkelanjutan. Terlihat bahwa aspek ekonomi kerap disebut sebagai salah satu pendekatan strategisnya. Berangkat dari kebijakan Thatcherisme di tahun 1970, Inggris mengandalkan kekuatan liberalisasi dan privatisasi sebagai sumber pemasukan utama dalam pemenuhan kepentingan nasional ekonomi<sup>2</sup>. Namun yang kemudian menjadi perhatian, hadirnya entitas sepakbola sebagai sebuah industri mengindikasikan perubahan kebijakan baru bagi pemerintah Inggris dalam pemenuhan kepentingan nasionalnya.

---

<sup>1</sup> Parliament UK, "3 Emergent strategy: how does the Government define the UK's national interests?", <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubadm/1625/162506.htm> (diakses 5 April 2015)

<sup>2</sup> Pidato Kenegaraan Margareth Thatcher, "Conservative General Election Manifesto 1983", <http://www.margareththatcher.org/document/110859> (diakses 1 Juni 2015)

Praktek Thatcherisme telah merubah arah perekonomian Inggris secara keseluruhan sejak tahun 1970-an hingga akhir 1990-an. Individu atau swasta diberi ruang sangat luas untuk terus melakukan akumulasi keuntungan melalui berbagai program privatisasi terhadap 16 perusahaan milik negara sebagai pencetusnya<sup>3</sup>. Empat batasan dalam kebijakan pemerintahan Thatcher<sup>4</sup> terkait institusi pada perusahaan sektor publik, yaitu: (1) memungkinkan pemindahan terhadap kepemilikan swasta, (2) membuka aktivitas terhadap kompetisi yang dikenal sebagai liberalisasi, (3) menghapus fungsi tertentu yang dilakukan oleh sektor publik secara bersamaan atau melakukan subkontrak kepada sektor swasta sehingga dapat dilakukan dengan biaya yang lebih rendah, (4) membebani masyarakat pada jasa di sektor publik yang disediakan secara percuma, tidak dapat dipenetrasi pada industri sepakbola yang bertipe kepemilikan privat<sup>5</sup>. Klub-klub sepakbola Inggris bukanlah perusahaan milik negara. Dengan demikian, satu-satunya cara untuk memenuhi kepentingan ekonomi nasional Inggris hanya bisa dicapai melalui liberalisasi kepemilikan klub dengan investor asing sebagai pemodal bisnis utama.

Sebagai informasi, dalam beberapa dekade terakhir, skala sepakbola sebagai olahraga dan bisnis telah berkembang pesat. Berawal pada 1991/1992, dua divisi teratas sepakbola Inggris, Liga Primer dan *Football League*

---

<sup>3</sup> Air dan industri pembuangan limbah, Baja, Bandar Udara, Besi, Bus, Mobil, Kereta Api, Keuangan, Listrik, Minyak dan Gas, Pelabuhan, Perkapalan, Pertahanan, Pesawat Terbang, Teknologi, Telekomunikasi. Lebih lanjut lihat John Kay, "Twenty Years of Privatization", 2002, [online] <http://www.johnkay.com/2002/06/01/twenty-years-of-privatisation> (diakses 31 Mei 2015)

<sup>4</sup> I. Bastian, "Model Pengelolaan Privatisasi", 2000, 27-29

<sup>5</sup> Anonim, "Premier League Organising Body, Who We Are", 2011, [online] <http://www.premierleague.com/content/premierleague/en-gb/about/who-we-are.html> (diakses 1 Juni 2015)

menghasilkan pendapatan gabungan £228 juta<sup>6</sup>, sedangkan di musim 2010/2011 meningkat menjadi £2,7 milyar, dengan £2,3 milyar yang dihasilkan dari kompetisi Liga Primer saja<sup>7</sup>. Pada musim 1995/1996, Liga Primer memimpin dengan €501 juta pendapatan dari pesaing terdekatnya, yaitu Serie A, Italia<sup>8</sup> sejumlah €452 juta. Seiring berjalannya waktu, kesenjangan dalam pendapatan antara Liga Primer dan liga sepakbola Eropa lainnya terus melesat mencapai €1 milyar pada musim 2007/2008, dengan catatan Liga Primer menghasilkan €2,4 juta berbanding dengan €1,4 juta untuk La Liga Spanyol, Bundesliga Jerman, dan Serie A Italia<sup>9</sup>. Berlanjut pada 2010/2011, total pendapatan di Liga Primer sukses menembus angka €2,5 milyar, berbanding €1,7 milyar untuk masing-masing Bundesliga dan La Liga, dan €1,6 milyar untuk Serie A<sup>10</sup>.

Fantastisnya angka pertumbuhan pendapatan tersebut adalah perubahan besar dari sebuah organisasi sepakbola. Segregasi antara tujuan dan aturan sepakbola tercermin pada struktur organisasi yang berbeda dan distribusi kekuasaan yang kemudian bergeser menjadi isu komersialisasi. Komersialisasi dalam jenis yang lebih baru dalam sepakbola telah meningkatkan ketegangan antara olahraga dan aspek ekonomi dari permainan<sup>11</sup>. Pada mulanya, klub sepakbola dipandang sebagai olahraga dan klub sosial yang dijalankan oleh

<sup>6</sup> Deloitte Sports Business Group, "Taking New Direction: Annual Review of Football Finance", 2007, <http://www2.deloitte.com/uk/en/pages/sports-business-group/articles/annual-review-of-football-finance.html> (diakses 4 April 2015)

<sup>7</sup> Deloitte Sports Business Group, "New rules, narrow margins: Annual Review of Football Finance", 2012, <http://www2.deloitte.com/uk/en/pages/sports-business-group/articles/annual-review-of-football-finance.html> (diakses 4 April 2015)

<sup>8</sup> Deloitte Sports Business Group, 2007

<sup>9</sup> Deloitte Sports Business Group, "National Interest: Annual Review of Football Finance", 2010, <http://www2.deloitte.com/uk/en/pages/sports-business-group/articles/annual-review-of-football-finance.html> (diakses 4 April 2015)

<sup>10</sup> Deloitte Sports Business Group, 2012

<sup>11</sup> W. Vamplew, "Pay up and Play the Game: Professional Sport in Britain, 1875-1914", 1988; J. Williams & S. Neatrou, "The New Football Economics", 2002; H.E. Meier, "Institutional complementarities and institutional dynamics: exploring varieties in European football capitalism", 2008

komite untuk kepentingan anggota dan masyarakat, bukan sebagai perusahaan komersial<sup>12</sup>. Mayoritas klub awalnya dibentuk menggunakan sistem struktur “kebersamaan” (mutual), akan tetapi timbulnya komersialisasi menyebabkan kebutuhan yang meningkat bagi mereka yang terlibat dalam menjalankan klub untuk melindungi diri dari tanggung jawab pribadi. Langkah dari klub ke perusahaan terbatas menjadi tak terelakkan. Masuknya investor asing dalam Liga Primer memainkan peran penting dalam perkembangan sejarah sepakbola Inggris dan tentunya sepakbola secara keseluruhan, sebab dalam penyelenggaraannya melibatkan sejumlah pelaku bisnis yang berawal dari ketidaktanggapan negara dalam meregulasi kebijakan kompetisi<sup>13</sup>.

Meski peran krusial investor asing dari terliberalisasinya kepemilikan klub membuat sepakbola Inggris melesat sebagai industri bisnis berkekuatan masif dengan kompetisi Liga Primer sebagai primadonanya, konsekuensi dari keputusan ini memancing permasalahan penting. Puncaknya pada musim 2012/2013, total sebelas klub Liga Primer dikuasai oleh investor asing berbanding sembilan klub yang dikendalikan oleh pemilik dalam negeri<sup>14</sup>. Manchester United, Arsenal, Aston Villa, Sunderland, dan Liverpool berkepemilikan asing dari Amerika Utara. Chelsea dan Reading dengan kepemilikan asal Rusia, Manchester City berkepemilikan asal Thailand, Southampton dengan kepemilikan dari Swiss, Queen Park Rangers dengan kepemilikan dari Malaysia dan India, dan Fulham dengan kepemilikan dari Mesir. Tren kepemilikan asing secara tak diduga

---

<sup>12</sup> D. Conn, “Why fans will never run football in England”, 2010, [online] <http://edition.cnn.com/2010/SPORT/football/11/02/football.fan.ownership.problems/index.html> (diakses 31 Mei 2015)

<sup>13</sup> Pembahasan lebih dalam akan disajikan di bab selanjutnya.

<sup>14</sup> A. M. Jones, “An Examination of the Motivations and Consequences of Foreign Direct Investment in the Premier League 1992-2012”, 2014, 1

memanuver kepentingan nasional Inggris yang telah terpecah oleh urgensi untuk melindungi kepentingan nasional lainnya yang tak kalah penting, yakni prestise nasional.

Fokus awal dari tujuan investor yang ingin memaksimalkan laba atas investasi saham mereka di perusahaan-perusahaan Inggris menemui hambatan serius ketika terjun pada perusahaan (klub) sepakbola. Berbeda dengan unit bisnis yang lain, sifat industri sepakbola yang unik tercermin dalam pemenuhan kepentingan prestise nasional Inggris. Prestise nasional dalam permasalahan ini diartikan sebagai identitas nasional Inggris yang diperoleh melalui sistem sepakbola modern. Kelahiran sepakbola modern<sup>15</sup> berasal dari Inggris dengan pembentukan Asosiasi Sepakbola (FA) pada tahun 1863 sebagai badan yang mengembangkan satu set formal dari aturan sepakbola. Melihat referensi permainan sepakbola dari masa kuno dengan beragam interpretasi<sup>16</sup>, maka kehadiran FA secara langsung menjadi kiblat permainan sepakbola modern yang menyediakan aturan main yang sebelumnya tak pernah dikenalkan di bangsa manapun. Perkembangan dari FA lebih lanjut merepresentasikan sepakbola sebagai permainan rakyat Inggris sebagai atraksi hiburan dan hobi bermain bola. Klub-klub amatir dimiliki oleh pengusaha lokal dan hanya memiliki sumber pendapatan dari pendapatan tiket penonton pertandingan<sup>17</sup>. Di sinilah letak prestise nasional Inggris bermula. Memiliki kekhasan tersendiri dalam nilai-nilai

<sup>15</sup> Penggunaan kata “modern” merujuk pada perubahan sepakbola dari suatu olahraga yang semula tidak memiliki regulasi permainan menjadi tertib di bawah badan pengawas permainan. Penjelasan lebih lengkap akan ditampilkan di bab selanjutnya.

<sup>16</sup> Terjadi bias antara permainan menggunakan bola, baik dari ukuran bola yang tidak sama maupun penggunaan anggota tubuh selain kaki. Contoh, olahraga rugby, cricket, dan hoki.

<sup>17</sup> B. Buraimo, dkk. “English Football”, 2006

sepakbolanya menjadi kekhawatiran utama pemerintah Inggris seiring tak dapat dibendunginya superioritas pemilik klub asing.

Kekhawatiran akan kelangsungan kepentingan prestise nasional Inggris kian nampak ketika liberalisasi kepemilikan tidak dibuka di liga nasional negara-negara lainnya, sehingga keaslian nilai permainan dan sistem liga nasionalnya masih bercirikan semangat kelokalan. Di Jerman<sup>18</sup>, kompetisi Bundesliga memiliki aturan 50%+1 yang memungkinkan fans/suporter memiliki hak suara mayoritas untuk pengambilan keputusan/voting di dalam kebijakan klub. Aturan ini menguntungkan suporter guna memberikan sumbangsuhnya kepada klub, antara lain memiliki posisi berpengaruh di antara direksi kepemilikan klub, penempatan wakil pada struktur klub, sumbangsuh pada tata kelola klub, dan menguatkan budaya respek antara suporter dengan klub. Sementara itu di kompetisi La Liga Spanyol<sup>19</sup>, perubahan signifikan neraca keuangan negatif pada hampir tiap klub sepakbola profesional di tahun 1992 membuat suporter yang tidak puas dengan pengelolaan klub berhak untuk mengajukan peningkatan transparansi manajemen klub dan mengorganisasikan diri dengan menjadi pemegang saham minoritas di klubnya. Dengan model kepemilikan seperti ini, sebuah klub bukanlah sekedar entitas bisnis belaka, justru mengapresiasi suporter sebagai konsumen murni. Klub seperti Barcelona memiliki sistem kepemilikan

<sup>18</sup> C. Müller, "Football Governance", 2011, <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmselect/cmcomeds/writev/792/fg84.htm>. (diakses 8 Maret 2015)

<sup>19</sup> Presiden Spanyol Joan Laporta dengan masa jabatan sampai Juni 2010 merupakan bagian dari kampanye *L'Elefant Blau* (Gajah Biru), sebuah kelompok yang menghendaki keterlibatan suporter secara demokratis di pengelolaan klub Barcelona. Terpilih pada tahun 2003, setelah adanya pembicaraan panjang untuk merubah status klub menjadi perusahaan saham gabungan, khususnya setelah melunasi hutang yang berasal dari rezim sebelumnya. Kampanye difokuskan pada kenyataan bahwa para anggota merupakan pemilik dan aset utama klub. Lebih lanjut lihat Dave Boyle, "*Barca: Fans Ownerships and The Future of Football*, 2010

yang bukan bersumber pada penyertaan saham melainkan model *membership* yang menembus angka hingga 170 ribu anggota suporter.

Hal berbeda terjadi di kompetisi Serie A, Italia<sup>20</sup>. Bagi orang Italia, masyarakat di sana dinilai belum menjadi siapa-siapa jika belum terjun ke dunia sepakbola. Popularitas sepakbola yang tinggi mampu melejitkan tingkatan kelas seseorang ke level terpendang. Stereotip masyarakat yang demikian membuat semua pihak berlomba-lomba masuk ke sepakbola. Hubungan antara sejumlah pebisnis dengan sepakbola langsung tercipta begitu Serie A bergulir pada puluhan tahun silam. Kegagalan beberapa pihak asing dalam mengakuisisi klub Serie A memperlihatkan betapa tinggi tingkat resistensi publik Italia. Itu tidak terjadi tanpa sebab. Mereka melakukannya karena menganggap sepakbola adalah bagian dari harkat dan martabat diri sehingga perlu dijaga sepenuh hati.

Menjadi liga sepakbola nasional paling menguntungkan di dunia dengan pendapatan lebih dari €2 milyar hanya untuk musim 2008-2009 saja<sup>21</sup>, Liga Primer yang diakui sebagai liga terbaik di dunia<sup>22</sup> telah menjadi ikon global yang tidak hanya menarik beberapa pemain dunia terbaik, namun juga sejumlah pengusaha kaya di dunia yang saling bersaing untuk menjadi pemilik dari klub-klub sepakbola. Kontrol penuh oleh pemilik baru dalam pembelian pemain asing juga menyinggung prestise nasional Inggris dilihat dari sisi kualitas tim nasional sepakbolanya. Sedikitnya kesempatan yang diberikan oleh pelatih (tentunya atas arahan dari pemilik klub) terhadap pemain murni Inggris berimbas buruk terhadap

<sup>20</sup> S. Campbell, "Serie A opening up to foreign investment", 2014, [online]  
<http://forzaitalianfootball.com/2014/10/serie-a-opening-up-to-foreign-investment/>  
 (diakses 5 April 2015)

<sup>21</sup> Deloitte, "Annual Review of Football Finance 2010", 2010,  
[http://www.deloitte.com/view/en\\_GB/uk/industries/sportsbusinessgroup/sports/football/0a4be867d38f8210VgnVCM200000bb42f00aRCRD.htm](http://www.deloitte.com/view/en_GB/uk/industries/sportsbusinessgroup/sports/football/0a4be867d38f8210VgnVCM200000bb42f00aRCRD.htm) (diakses 25 Mei 2015)

<sup>22</sup> G. Farquhar, "Is Premier League world's best?", 2008, [online]  
<http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/7342535.stm> (diakses 25 Mei 2015)

perkembangan dan prestasi di timnas, sementara negara tidak memiliki wewenang untuk mengatasinya. Bagaikan langit dan bumi. Ungkapan yang mungkin bisa dikatakan tepat untuk mencerminkan kesenjangan prestasi antara tim nasional Inggris dan klub sepakbola Liga Primer. Kali terakhir hanyalah menjadi juara Piala Dunia 1966<sup>23</sup>, setelahnya, tidak ada lagi prestasi bagus dari timnas Inggris baik di Piala Eropa<sup>24</sup> maupun Piala Dunia. Prestasi Inggris justru cenderung merosot pasca menjadi yang terbaik di tahun 1966. Tim-tim lokal kini cenderung berisikan para pemain asing.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditampilkan, pergeseran yang menentukan arah tujuan promosi strategis oleh Inggris untuk menjaga kepentingan nasionalnya memang berawal dari pendekatan industri bisnis Thatcherisme dengan orientasi profit. Namun yang kemudian tak diduga, aksi liberalisasi oleh pemerintah tertular pada industri sepakbola yang tumbuh menjadi kekuatan perekonomian baru. Kepemilikan oleh asing dengan kontrol penuh atas klub menyulitkan situasi pemerintah Inggris yang berujung pada lepasnya prestise nasional melalui identitas sepakbola Inggris dari sisi keaslian nilai permainan. Negara tidak memiliki kendali atas perusahaan (klub) yang memang sedari awal bukan miliknya. Menarik untuk selanjutnya menyangsikan apa yang tersisa dari kepentingan nasional Inggris terhadap Liga Primer.

Melihat enam tujuan strategis Inggris dalam kepentingan nasional sebagaimana telah disebutkan di awal, –salah satunya budaya yang dinamis– lebih lanjut menunjukkan bahwa pemerintah Inggris berupaya untuk menjaga aset-aset

---

<sup>23</sup> Anonim, "Hurst the hero for England in the home of football", 2007, <http://www.fifa.com/worldcup/archive/england1966/index.html> (diakses 5 April 2015)

<sup>24</sup> Kompetisi sepakbola antar negara Eropa.

milik negara<sup>25</sup>. Logika yang kemudian didapat adalah Inggris membutuhkan pendekatan strategis baru untuk menyelamatkan identitas prestise nasional melalui sepakbola yang makin terkikis oleh kedatangan para investor asing di Liga Primer. Dilematisnya, gemerlapnya kompetisi Liga Primer sebagai sebuah entitas bisnis yang telah terliberalisasi justru berdampak positif pada meningkatnya perekonomian negara. Berangkat dari logika tersebut, penelitian ini menjadi penting dalam kaitannya mencari upaya Inggris untuk mempertahankan kelangsungan kepentingan nasionalnya melalui realisasi kesinambungan dari dua pendekatan strategis, yakni prestise dan ekonomi nasional.

### **I. 2. Rumusan Masalah**

Mengapa liberalisasi kepemilikan klub Liga Primer berdampak besar pada kelangsungan perubahan orientasi kepentingan nasional Inggris?

### **I. 3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum dimaksudkan untuk mengidentifikasi strategi Inggris dalam melindungi kelangsungan kepentingan nasionalnya melalui terliberalisasinya kepemilikan klub Liga Primer. Pilihan untuk mengeksplor tujuan tersebut dipandang penting dalam kaitan sifat Liga Primer yang tidak biasa. Sebelum industrialisasi sepakbola muncul, banyak negara dalam tata kelola liga nasionalnya memiliki regulasi yang seragam mengenai aturan kepemilikan klub, yakni dengan aktor Negara sebagai pemegang kontrol tertinggi, diikuti oleh kuatnya sistem berbasis jaringan suporter dan khususnya para penggemar lokal

---

<sup>25</sup> Parliament UK, "3 Emergent strategy: how does the Government define the UK's national interests?"

sebagai pemilik klub secara bersama-sama. Lain halnya dengan Inggris yang justru membuka lebar pintu bagi investor-investor asing untuk melakukan akuisisi dan secara gradual menguasai struktur kepemilikan klub. Dengan kebijakan tidak biasa oleh Inggris tersebut, menarik untuk melihat kelangsungan kepentingan nasional Inggris setelahnya.

#### **I. 4. Kerangka Pemikiran**

##### **I.4.1 Hubungan Liberalisasi dan Masalah Kelangsungan Kepentingan Nasional**

Pada dasarnya, peran negara sebagai pengatur dan pengelola ekonomi nasional bertujuan untuk mendapat keuntungan melalui mekanisme perdagangan. Namun untuk memperoleh keuntungan maksimal, beragam cara bisa ditempuh. Merkantilisme memformulasikan pemikirannya bahwa ekonomi seharusnya menjadi bagian dari tujuan negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya, dalam kaitan dengan kekayaan, kekuatan, dan gengsi<sup>26</sup> untuk membangun negara yang kuat. Untuk mencapai kesejahteraan, negara harus memperbesar ekspor dan memperkecil impor yang berujung pada kebijakan proteksionis. Alexander Hamilton percaya bahwa peran kuat dari negara dengan mempromosikan industri dalam negeri dapat memukul mundur pesaing ekonomi asing<sup>27</sup>. Cara ini mendapat kritik dari Adam Smith dan David Ricardo. Menurut keduanya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal, negara harus menghilangkan campur tangan dan membiarkan ekonomi berjalan sesuai mekanisme pasar. Kebebasan pasar dipercaya sebagai cara terbaik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dalam

<sup>26</sup> S. B. Clough dan Cole C. W. "Economic History of Europe", 1967, 99

<sup>27</sup> D. N. Balaam dan M. Veseth, "Introduction to international political economy", 2005

logika Liberalisme. Namun, terlalu bebasnya pergerakan ekonomi pasar ini membuat Marxisme mempermasalahkan bagaimana kekuatan pasar dapat mendorong lahirnya struktur kelas diikuti dengan eksploitasi, konflik, dan krisis dalam negara-bangsa. Negara ada untuk mendukung dan membela kepentingan kelas dominan pemilik modal borjuis<sup>28</sup>. Akibatnya, konflik tersebut meluas ke seluruh dunia dalam gelombang kapitalisme. Perluasan pertama mengambil bentuk imperialisme dan kolonialisme, sedangkan fase kedua mengambil bentuk globalisasi ekonomi yang dipimpin oleh *multinational corporation*.

Seiring dengan berkembangnya globalisasi, perdagangan bebas dan pasar terbuka membuat dilema antara negara dan pasar. Pada kondisi tersebut, Gilpin menawarkan pemikiran bahwa logika pasar adalah untuk menemukan kegiatan ekonomi paling produktif dan menguntungkan, sementara logika negara adalah untuk menangkap dan mengontrol proses pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal<sup>29</sup>. Penjelasan Smith mengakomodasi alternatif ini. Kebebasan individu pasar mewakili pilihan terbaik untuk mekanisme perdagangan negara modern. Liberalisasi ekonomi menghendaki minimnya pemerintah atau tidak ada sama sekali. Pasar cenderung meluas secara spontan demi kepuasan kebutuhan manusia, dimana pemerintah tidak diijinkan ikut campur, dengan kata lain liberal berasumsi pasar akan berkembang dengan sendirinya.

Resonansi Thatcherisme pada tahun 1970-an mendasari logika kepentingan nasional Inggris dalam menerapkan sistem ekonomi liberal, yakni harapan untuk menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> R. Gilpin. "Three Ideologies of Political Economy" dalam *The Political Economy of International Relations*, 1987, 25-64

kegiatan ekonomi. Asumsi dasar pendekatan liberalisme ekonomi dipahami oleh Scott Burchill<sup>30</sup> memuat nilai-nilai berikut: (1) mengunggulkan paham kebebasan individual, (2) kebutuhan membentuk institusi untuk mengakomodasi beragam kepentingan individual supaya tidak saling berkonflik, (3) individual mesti bebas dari intervensi pemerintah, dan (4) mendukung opsi pasar kapitalisme sebagai cara terbaik untuk mencapai kesejahteraan. Strategi kepentingan nasional Inggris tampak sesuai dalam desain Liberalisme. Penjelasannya, adanya campur tangan dan regulasi-regulasi yang dibuat oleh negara dianggap dapat menghambat berkembangnya pasar. Hal ini bukan berarti menghilangkan peran negara secara keseluruhan, namun hanya meminimalisir peran negara. Negara hanya mengamati bagaimana pasar berjalan dan akan bertindak ketika dibutuhkan. Kaum liberal menyebut sistem ini sebagai sistem *laissez-faire*<sup>31</sup>. Untuk itu aktor-aktor non-negara seperti perusahaan asing memiliki peranan yang besar dalam menciptakan kestabilan ekonomi.

Lebih lanjut, peran negara dalam kebijakan liberalisasi menciptakan lingkungan yang mendukung bekerjanya pasar, sesuai dengan empat gagasan pokok dalam liberalisme: (1) diakuinya hak milik perorangan secara luas bahkan hampir tanpa batas (2) pada semua individu diakui adanya motif ekonomi yang mengejar keuntungan maksimal, (3) adanya kebebasan untuk berkompetisi antarindividu, dan (4) adanya mekanisme pasar yang mengatur persaingan dan kebebasan tersebut. Liberalisme cenderung untuk mengatur sedemikian rupa pasar ekonomi dalam rangka mencapai efisiensi yang maksimum, pertumbuhan

<sup>30</sup> S Burchill dan A Linklater, "Liberalism", dalam *Theories of International Relations*, 2008, 57

<sup>31</sup> R. Jackson dan G. Sorensen, "International Political Economy" dalam *Introduction to International Relations*, 1999, 175-216

ekonomi, dan kesejahteraan individu<sup>32</sup>. Jika pasar dibiarkan berjalan secara bebas, maka dipercaya perekonomian akan mengalami peningkatan. Hal ini akan berdampak pada kesejahteraan individu yang juga semakin meningkat. Kemudian apabila kesejahteraan individu ini telah terjamin, maka kekuatan dan keamanan juga akan ikut terjamin.

Melihat kepercayaan diri Inggris dengan sistem perekonomian terbuka yang mengusung keunggulan liberalisasi, kelangsungan kepentingan nasional memunculkan kekhawatiran baru mengenai konsistensi dari gagasan-gagasan ekonomi liberal tersebut bila dihadapkan dengan industri olahraga sepakbola sebagai sebuah entitas bisnis berjenis baru, dengan sentuhan kultural emosionalnya yang tidak bisa dipandang remeh. Menjawab tantangan tersebut, strategi kepentingan nasional Inggris akan ditelusuri lebih dalam pada bagian selanjutnya.

#### **1.4.2 Kekhasan Sepakbola sebagai Industri**

Kepentingan nasional memiliki peran vital dan mendasar bagi suatu negara, mulai dari kelangsungan hidup, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, hingga kesejahteraan ekonomi dari bangsa tersebut. Sudah cukup jelas seperti perkataan Morgenthau<sup>33</sup>, kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi serta mempertahankan identitas fisik, politik, dan budaya dari gangguan negara lain. Terdapat setidaknya dua hal dasar yang perlu diperhatikan mengenai kepentingan nasional, yakni *material*

<sup>32</sup> R. Gilpin, 1987

<sup>33</sup> H. J. Morgenthau, "Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace", 1978

*interest* dan *spiritual interest*<sup>34</sup>. Kepentingan material diantaranya adalah keamanan dan pengembangan, sedangkan kepentingan spritual ialah kehormatan dan pengakuan dari dunia internasional. Industri sepakbola di Inggris menawarkan poin-poin tersebut. Sudah menjadi prioritas bagi pemerintah Inggris untuk melindungi apa yang menjadi identitas nasional negaranya. Di samping menjadi entitas bisnis untuk menggerakkan perekonomian, penjelasan kekhasan sepakbola sebagai sebuah industri hadir dalam tiga interpretasi utama dari sifatnya yang unik: *pertama*, mengusung misi kepentingan prestise nasional; *kedua*, keterlibatan aktor pasar yang cenderung *non-state*; dan *ketiga* yakni tipe perusahaan (klub) yang bukan milik negara, sehingga kebijakan privatisasi yang selama ini menjadi andalan pemerintah Inggris menemui kendala serius. Menarik untuk mengulasnya satu persatu.

Pemahaman mengenai kepentingan prestise nasional Inggris memuat beragam definisi konseptual. O'Neill, Joshi, dan Lebow sepakat bahwa konsepsi mengenai prestise bila diperpanjang adalah sebuah bentuk kehormatan<sup>35</sup>. Weber dan Reinhold menganggap prestis adalah status<sup>36</sup>, sedangkan Tang, Sharman, dan Wylie melihatnya sebagai bentuk reputasi<sup>37</sup>, serta bentuk kemuliaan, kredibilitas, kebanggaan dan legitimasi menurut Slomp<sup>38</sup>. Harga diri individu dan harga diri nasional, juga terkait dengan prestise, seringkali mencerminkan satu sama lain<sup>39</sup>.

<sup>34</sup> V. Dugis, "*National Interest*", materi disampaikan pada kuliah Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Airlangga.

<sup>35</sup> B. O'Neill, "Honor, Symbols and War", 1999; S. Joshi, "Honor in International Relations", 2008; R. Lebow, "A Cultural Theory of International Relations", 2008

<sup>36</sup> M. Weber, "Wirtschaft und Gesellschaft. Tu" bingen", 1922; M. Reinhold, "Status symbols in the ancient world", 1969

<sup>37</sup> S. Tang, "Reputation, cult of reputation, and international conflict", 2005; J. Sharman, "Rationalist and constructivist perspectives on reputation", 2007; L. Wylie, "Valuing reputation and prestige: Canadian foreign policy and the international criminal court", 2009

<sup>38</sup> G. Slomp, "Thomas Hobbes and the Political Philosophy of Glory. Houndmills", 2000

<sup>39</sup> L. Greenfeld, "Nationalism: Five Roads to Modernity", 1992

Dimensi positif dalam prestise nasional berlaku untuk menjunjung tinggi status yang diinginkan oleh suatu negara dibanding negara lain. Prestise pada mulanya berkaitan erat dengan kebutuhan negara membangun kekuatannya. Morgenthau banyak menjabarkan arti kekuatan nasional sebagai bagian dari perilaku dasar negara<sup>40</sup>, berlaku baik bagi negara maupun individu yang menjadi warga negara. Kesan juga dapat menjadi tolak ukur dari seberapa besar kekuasaan negara tersebut. Dengan prestise, negara lain akan memiliki kesan tentang bagaimana besarnya kekuasaan negara tersebut.

Ekspresi prestise nasional juga dapat diartikan dalam pencegahan atau resolusi konflik dalam konteks-konteks berikut: dunia masyarakat sipil, komunitas nasional atau jaringan global. *“Publics and political elites want the states and nations to which they belong and represent to be favourably perceived.”*<sup>41</sup> Ekspresi yang demikian adalah salah satu bentuk nasionalisme. Penggabungan bangsa dalam wadah politik menurut Breiner dapat membuat prestise negara dan nasionalisme berhasil mengatasi solidaritas yang terbatas yang dihasilkan oleh kelas, kelompok status, dan partai-partai<sup>42</sup>. Logika ini membuat prestise negara akan memiliki efek mendalam pada politik dalam negeri, sehingga menjadi tetap penting<sup>43</sup>.

Prestise nasional mengarahkan pada cara (bangsa) “kita” memperlakukan (bangsa) “mereka” dan perasaan diakui. Dalam kehidupan sosial manusia, *recognition* atau pengakuan merupakan wujud penting di dalam pembentukan

<sup>40</sup> H. J. Morgenthau, 1978

<sup>41</sup> S. Wood, “Prestige in world politics: History, theory, Expression”, 2013, 391

<sup>42</sup> P. Breiner, “Unnatural selection: Max Weber’s concept of Auslese and his criticism of the reduction of political conflict to economics”, 2004

<sup>43</sup> M. Evans dan J. Kelley, “National pride in the developed world: Survey data from 24 nations”, 2002

identitas. Charles Taylor<sup>44</sup> melihat bahwa ada hubungan antara identitas dan pengakuan; bahwa salah satu aspek pembentuk identitas, baik itu baik atau buruk, adalah pengakuan. *Misrecognition* dalam menginterpretasikan identitas suatu kelompok masyarakat tertentu dapat berdampak negatif. Adanya pengakuan yang melenceng tentang suatu masyarakat dapat menciptakan identitas yang berdampak pada terjadinya ketimpangan status dan struktur sosial. Argumen menarik muncul dari Nye bahwa budaya adalah suatu entitas yang dapat menarik perhatian negara lain: nilai-nilai politis menjadi identitas di luar batas negara tersebut. Kebijakan negara menjadi bukti legitimasi dan otoritas di ranah internasional<sup>45</sup>.

Meskipun prestise dikaitkan dengan bangsa, ketika dievaluasi secara keseluruhan prestise nasional memiliki delapan atribut ukuran penentu<sup>46</sup>: fisik (geografis dan demografi), ekonomi, internal politik, militer, artistik dan sains; aspek relasional internasional, karakter nasional, dan sikap (penilaian abstrak seperti suka atau tidak suka) terhadap bangsa lain. Disertakannya variabel ekonomi dalam ukuran prestise nasional menjadi pengantar untuk kekhasan kedua dan ketiga dari industri sepakbola, yakni kecenderungan peran aktor *non-state* dalam pasar dan konsistensi poin-poin ekonomi liberal terhadap kebijakan liberalisasi dan privatisasi dalam kelangsungan kepentingan nasional Inggris.

Sebagaimana telah dipahami, penerapan liberalisasi dapat dilihat melalui tindakan pembebasan area perdagangan barang dan jasa suatu negara, sehingga dapat diakses seluas-luasnya oleh pelaku-pelaku ekonomi bisnis baik yang berasal dari dalam maupun luar negara. Singkatnya, liberalisasi berarti pengurangan atas

<sup>44</sup> C. Taylor, "The Politics of Recognition", dalam Amy Gutmann ed. "Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition", 1994

<sup>45</sup> J. S. Nye, "Public Diplomacy and Soft Power", dalam "Annals of the American Academy of Political and Social Science", 2008

<sup>46</sup> Michiya S dkk., "An Attempt To Construct a National Prestige Index", 1961

berbagai pembatasan yang mengatur aktivitas perekonomian yang berlangsung di suatu negara. Pembatasan yang dikenal sebagai kebijakan Thatcherisme ini selanjutnya menjadi pintu masuk bagi kegiatan privatisasi yang secara umum dapat diartikan sebagai kebijakan pemerintah dengan memberi berbagai fasilitas yang memudahkan pihak swasta dalam mengambil alih perusahaan-perusahaan milik negara<sup>47</sup>. Waterhouse<sup>48</sup> mencatat bahwa setidaknya ada 6 (enam) tujuan privatisasi sebagai berikut: (1) meningkatkan pendapatan baru bagi pemerintah, (2) mendorong efisiensi ekonomi, (3) mengurangi campur tangan pemerintah dalam perekonomian, (4) mendorong kepemilikan saham yang lebih luas, (5) memberikan kesempatan untuk mengenalkan persaingan, dan (6) mengembangkan pasar modal negara.

Terdapat kesamaan dari sejumlah penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa privatisasi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Megginson, Nash, dan van Randenborgh<sup>49</sup> dalam penelitiannya terhadap 61 perusahaan dari 18 negara dan 32 sektor industri dengan jangka waktu 1961-1989 membandingkan kinerja perusahaan dari 3 (tiga) tahun sebelum privatisasi hingga 3 (tiga) tahun setelah privatisasi, mendapatkan hasil bahwa secara ekonomi dan statistik terdapat peningkatan secara signifikan dalam output, efisiensi operasional, profitabilitas, pemanfaatan modal investasi, dan pembayaran dividen setelah proses privatisasi. Barro dan Sala-I Martin<sup>50</sup> serta Wacziarg<sup>51</sup> sepakat bahwa liberalisasi pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi, skala ekonomi,

<sup>47</sup> A. E. Choirie, "Privatisasi versus Neo-Sosialisme di Indonesia", 2004, 16

<sup>48</sup> P. Waterhouse, "*Privatization: Learning the lessons from the U.K Experience*", 1989

<sup>49</sup> Megginson dkk., "The Financial and Operating Performance of Newly Privatized Firms: An International Empirical Analysis", 1994

<sup>50</sup> R. Barro dan Sala-I Martin, "Economic Growth", 1995

<sup>51</sup> R. Wacziargh, "Trade, Competition, and Market Size", 1997

persaingan, produktivitas faktor dan arus perdagangan. Verbrugge, Megginson, dan Owens<sup>52</sup> juga mendapat kesimpulan serupa dalam penelitiannya terhadap 65 bank yang secara penuh atau sebagian diprivatisasi dengan menggunakan metode penjualan saham dari tahun 1981-1996. Namun, ada kesamaan lebih penting yang harus digarisbawahi: logika efisiensi dari kegiatan privatisasi tersebut hanya berlaku untuk perusahaan milik negara.

Pemikiran inilah yang tidak dapat diterapkan dalam industri sepakbola Inggris yang sedari awal adalah milik privat. Konsep pengembangan industri dengan cara meningkatkan peranan swasta pada kekuatan pasar namun negara masih memegang sebagian kontrol dalam pelaksanaannya menjadi pilihan. Meski begitu, regulasi yang dijalankan oleh negara tidaklah untuk memonopoli pasar melainkan hanya untuk mengatur hal-hal yang dianggap perlu mendapatkan campur tangan pemerintah, dengan tujuan untuk melancarkan jalannya bisnis internasional dan mencapai kepentingan ekonomi dari negara itu sendiri<sup>53</sup>. Pemerintah Inggris tidak ingin kehilangan kontrol atas orientasi profit, namun juga secara sadar berusaha menjaga prestise identitasnya melalui sepakbola. Terlebih lagi, sepakbola adalah unit kultural yang memiliki nilai historis kental bagi masyarakat Inggris. Oleh karenanya, dibutuhkan pendekatan strategi baru untuk melindungi kepentingan nasional Inggris pasca terliberalisasinya kepemilikan klub, yakni kepentingan nasional berorientasi prestise dan berorientasi profit.

---

<sup>52</sup> Verbrugge, dkk., "State Ownership and the Financial Performance of Privatized Banks: An Empirical Analysis", 1999

<sup>53</sup> P. R. Krugman dan M. Obstfeld, "International Economics: Theory and Policy", 2004, 56

## I. 5. Hipotesis

Di tengah negara-negara yang masih membatasi kepemilikan klub oleh asing, kelangsungan kepentingan nasional Inggris dalam liberalisasi kepemilikan klub Liga Primer masih terlindungi. Kelangsungan kepentingan itu sendiri ialah perubahan orientasi prestise nasional Inggris yang sebelum terliberalisasi didefinisikan sebagai pencetus negara sepakbola modern menjadi terjaganya reputasi negara dalam gemerlap dinamika klub Liga Primer. Beralihnya kepentingan nasional Inggris dalam liberalisasi kepemilikan klub Liga Pimer dari orientasi prestise menjadi berorientasi profit memberikan negara keuntungan langsung berupa pemasukan pajak dan keuntungan tidak langsung bersifat jangka panjang bersumber dari investasi asing, *multiplier effect*, dan peningkatan pendapatan nasional dalam kaitannya. Menariknya, melalui ini lantas pemerintah Inggris berusaha mencapai kepentingan nasionalnya dalam kelangsungan dan kesinambungan antara orientasi prestise dan profit.

## I. 6. Metodologi Penelitian

### I. 6. 1 Definisi Konseptual

#### I.6.1.1 Orientasi Prestise Nasional dalam Olahraga

Chenxi Pan boleh mengidentifikasi tujuan awal olahraga untuk kebugaran tubuh demi mendapatkan bahan makanan di hutan, pertahanan diri dari serangan hewan buas dan cuaca buruk<sup>54</sup>, namun dari proses interaksi antarindividu dalam perkembangan selanjutnya, olahraga menjadi simbol dari kelas di dalam masyarakat dengan nilai sosio-kultur yang diwariskan ke setiap generasi manusia.

<sup>54</sup> C. Pan, "Paradox of Sport and Politics in China - Applied to C.L.R. James' Theory", 2011

Mereka yang mampu memenangkan pertandingan olahraga akan memiliki derajat yang tinggi di dalam masyarakat. Tak salah jika Nye melihat olahraga sebagai salah satu instrumen *soft power* berwujud prestise, karena olahraga termasuk dalam budaya yang mampu menarik perhatian orang lain<sup>55</sup>. Dengan demikian, olahraga kian penting artinya sebagai salah satu kekuatan untuk menggapai kepentingan nasional. Prestise yang diasosiasikan dengan *national image* merupakan salah satu *intangible power* sumber kekuatan nasional, yaitu kekuatan yang tidak dapat dilihat secara indrawi, seperti karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi ataupun kualitas pemerintah<sup>56</sup>.

Ketika prestise nasional dikaitkan dengan *national image*, maka sebuah negara harus menjaga reputasinya di mata negara lain. Menurut Olins dalam Christelis<sup>57</sup>, negara mengembangkan *brand* nasional mereka untuk bersaing dalam hal investasi, perdagangan dan pariwisata, termasuk di dalamnya yakni olahraga. Pharoah menambahkan bahwa suatu negara perlu untuk memperhatikan reputasinya agar dapat terus bersaing dengan negara-negara lainnya<sup>58</sup>. Pemerintah pun akhirnya menjadi pihak yang harus mengelola reputasi dari negara tersebut layaknya manajer sebuah *brand* dalam suatu perusahaan. Negara kini sudah menyadari bahwa reputasi itu penting, dan apabila reputasi itu penting maka reputasi tersebut perlu untuk dikelola.

<sup>55</sup> J. S. Nye, "The Olympics and Chinese Soft Power", 2008, [http://www.huffingtonpost.com/joseph-nye/the-olympics-and-chinese\\_b\\_120909.html](http://www.huffingtonpost.com/joseph-nye/the-olympics-and-chinese_b_120909.html) (diakses 17 November 2014)

<sup>56</sup> H. J. Morgenthau, 1978, 203

<sup>57</sup> D. Christelis, "Country reputation management: identifying the drovers of south africa's reputation in german media", 2006, 14

<sup>58</sup> Pharoah dalam Christelis, 2006, 14

Passow dkk.<sup>59</sup> menjelaskan mengenai pentingnya suatu negara dalam mengelola reputasinya, yaitu: (1) sebuah negara ada dan beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif; (2) sebuah negara sangat bergantung pada sumber daya dan perilaku yang mendukung; (3) sebuah negara harus mengikuti logika keuangan; (4) sebuah negara harus tampak menarik di mata publiknya; (5) sebagian besar, fungsi dari suatu pemerintahan dapat dibandingkan dengan fungsi manajemen suatu perusahaan; (6) sebuah negara mempunyai visi dan konsep yang strategis; dan (7) sebuah negara mempunyai tanggung jawab sosial yang lebih besar dibandingkan dengan suatu perusahaan.

#### **I.6.1.2 Orientasi Profit Nasional dalam Olahraga**

Kualitas baik atau buruknya perekonomian suatu negara dapat memengaruhi kondisi negara tersebut secara keseluruhan. Pemerintah Inggris melihat kompetisi Liga Primer sebagai penyambung hidup bagi banyak warga negaranya dan menghasilkan *multiplier effect*<sup>60</sup>. Dimaknai sebagai efek pengganda, keuntungan dari *Multiplier effect* diperoleh dan dihasilkan oleh interaksi antarpihak; dalam kasus ini adalah pelaku olahraga di Liga Primer. Kekhasan industri olahraga semakin kental bila diasosiasikan dengan fenomena *Sportainment*, yakni ketika kegiatan yang melibatkan aktivitas fisik dan keterampilan oleh persaingan antar individu atau tim difungsikan untuk hiburan. *Sportainment* merupakan reaksi pasar terhadap meningkatnya permintaan populer untuk suatu keahlian manusia yang unggul, ditambah dengan keinginan penonton

<sup>59</sup> Passow dkk. "Country reputation – from measurement to management: the case of liechtenstein", 2005, 312

<sup>60</sup> R. Giulianotti, "Football: A Sociology of the Global Game", 1999

untuk merasakan pengalaman baru dalam menyaksikan permainan olahraga<sup>61</sup>. Industri dalam pandangan pemasaran olahraga adalah sebuah produk atau jasa yang saling berhubungan dan berusaha memuaskan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen<sup>62</sup>. Tabel I.1 berikut menunjukkan bahwa negara memainkan peran penting dalam industri olahraga melalui *multiplier effect*.

Tabel I.1 *Multiplier Effect* dalam Industri Olahraga

Pemerintah Kementerian Olahraga Kebijakan Pemerintah Daerah Undang-undang Infrastruktur Fisik					
Supplier	Produksi, infrastruktur dan jasa pendukung	Organisasi olahraga dan jenis kegiatan	Jasa pelayanan dan partisipasi olahraga	Media dan publikasi Fasilitas dan gedung	Pemasaran dan penjualan akhir
Konstruksi	Pusat kebugaran, kesehatan, dan medis	Organisasi olahraga nasional dan daerah	Keanggotaan klub	Cetak	Konsultan
Manufaktur	Agen rekreasi	Agen organisasi	Atlit	TV berbayar	Periklanan dan humas
Peralatan	Pelatihan pelatih	Olahraga non-pemerintah		Internet	Jasa pendukung kejuaraan
Pakaian, makanan, minuman, dan suplemen	Sponsor	Kejuaraan dan pemilik kejuaraan		Permainan judi	Manajemen atlit
Jasa pelayanan	Jasa pendidikan dan jasa penelitian	Liga dan kompetisi		Fasilitas umum dan khusus	Hukum olahraga
	Pengembangan institusi olahraga	Festival olahraga		Pusat area masyarakat	Akomodasi
	Properti intelektual	Lembaga pendidikan		Taman dan halaman	
	Informasi dan teknologi				

(Sumber: Smith, 2008, 15)

<sup>61</sup> M. Hall, "Taking the Sport out of Sports", 2002, [online]  
<http://m.sportsbusinessdaily.com/Journal/Issues/2002/08/20020819/Opinion/Taking-The-Sport-Out-Of-Sports.aspx> (diakses 17 November 2014)

<sup>62</sup> A. Smith, "Introduction to Sport Marketing", 2008

Selain dari *multiplier effect*, konsep profit juga dapat dipahami dari arus modal internasional. Perhatian utama modal internasional yang bersifat investasi modal asing langsung adalah untuk mendapatkan *return* yang lebih tinggi dibandingkan di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik. Liga Primer mencakup keseluruhan itu. Untuk menarik signifikansi arus modal ke suatu negara, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi yaitu: (1) iklim investasi yang kondusif<sup>63</sup>, (2) prospek pengembangan di negara penerima modal<sup>64</sup>, (3) pengaruh rasio ekspor dan impor terhadap GDP terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI). Kenaikan atau penurunan rasio ekspor dan impor terhadap GDP (Gross Domestic Product) akan menunjukkan tingkat keterbukaan suatu negara<sup>65</sup>. Dengan diketahui tingkat keterbukaan ekonominya, maka apabila suatu negara semakin terbuka terhadap aktivitas ekonomi dari negara lain artinya semakin relatif terbuka/tinggi juga negara lain untuk menginvestasikan modalnya di negara tujuan dan sebaliknya. Sehingga, semakin tinggi tingkat keterbukaan ekonomi suatu negara maka semakin tinggi pula tingkat penanaman modal asing langsung. Liga Primer adalah satu-satunya liga sepakbola dengan aturan finansial berbeda yang menganut sistem perekonomian terbuka Inggris. FDI adalah salah

<sup>63</sup> R. Vernon, "International investment and international trade in the product cycle", 1966

<sup>64</sup> P. Mallampally dan K. P. Sauvant, "Foreign Direct Investment in Developing Countries", 1999, [online] <http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1999/03/mallampa.htm>.

<sup>65</sup> Bermula saat sebuah perusahaan dari satu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara asal (*home country*) dapat mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (*host country*) baik sebagian atau seluruhnya. Pemerintah sangat memberi perhatian pada FDI karena aliran investasi masuk dan keluar dari negara dapat menghasilkan dampak yang signifikan. Para ekonom menganggap FDI sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi karena memberi kontribusi pada ukuran-ukuran ekonomi nasional seperti GDP; salah satu cara untuk melihat tingkat kemakmuran suatu negara yang diukur melalui pendapatan nasional dari tiap perusahaan/individu (termasuk warga asing) yang melakukan aktivitas ekonomi di negara tersebut selama satu tahun. Lebih lanjut lihat R. Kappel, "Openness, Institutions and Policies: Determinants of Globalization and Economic Growth in Developing Countries The Pakistan Development", 2003

satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal dan menjadi pendekatan paling tepat dalam liberalisasi kepemilikan klub Inggris.

## **I. 6. 2 Definisi Operasional**

### **I.6.2.1 Orientasi Prestise Nasional dalam Olahraga**

Prestise nasional Inggris terkait reputasi sudah barang tentu perlu untuk dipertahankan. Dampak dari liberalisasi kepemilikan klub lantas menghendaki Inggris guna mempertahankan prestise nasionalnya. Sebagai pengingat, diakuinya identitas Inggris sebagai negara kelahiran sepakbola modern (melalui FA sebagai pembuat aturan formal) menjadi bentuk awal prestise Inggris sebelum terjadi liberalisasi. Nilai keaslian permainan yang perlu dicermati: sepakbola hanya untuk olahraga hiburan semata, dipandu oleh seperangkat aturan yang jelas dalam permainan. Sementara isu komersialisasi beberapa tahun kemudian mendesak pemerintah untuk memulihkan stabilitas finansial liga, (pada saat itu masih berada di bawah sistem *Football League*) muncul semangat prestise nasional baru dalam bentuk reputasi tim nasional sepakbola Inggris yang perlu untuk diselamatkan akibat dari idealisnya kontrol pemilik asing. Dibukanya kepemilikan klub oleh asing menjadi batu loncatan perbaikan pendapatan liga, ditandai dengan berdirinya Liga Primer dengan kontrol terbatas dari pemerintah (FA). Berkaitan dengan hal tersebut, pilihan pendekatan profit dihadirkan.

### **I.6.2.2 Orientasi Profit Nasional dalam Olahraga**

Penyederhanaan *multiplier effect* dalam kasus Liga Primer dipahami sebagai berikut. Pertama, orang-orang terkait pemerintahan yang secara kolektif

disebut sebagai sektor publik. Penelitian ini menuliskan Negara sebagai unit utamanya. Profit yang didapat oleh Negara bersumber dari dua pemasukan utama, yakni aliran FDI dan beban pajak. Beban pajak dari pemain yang berlaga (terutama pemain bintang karena besarnya gaji) di Liga Primer sangat tinggi. Fenomena ini berkontribusi langsung terhadap sektor pariwisata Inggris, karena tentunya akan banyak penggemar yang ingin melihat langsung pemain pujaannya dan menikmati kemegahan stadion-stadion Inggris. Selain itu, tingginya nilai pajak berpotensi memunculkan hutang bagi klub dan menjadi pemasukan “tak terduga” bagi negara. Berhutang menjadi pilihan terakhir oleh klub untuk penyimpanan stok dana operasional.

Pelaku kedua, yakni industri olahraga yang secara komersial terfokus, diwakili oleh Media Lokal melalui lisensi penjualan hak siar televisi. Nilai kontrak hak siar Liga Primer sudah mencatat rekor-rekor fantastis dibanding industri olahraga lainnya, sebut saja basket melalui NBA hingga balapan otomotif F1 dan MotoGP. Media lokal masing-masing negara tentu bersaing sengit untuk mendapatkan hak siar tersebut. Sudah jelas, mereka membutuhkannya untuk memuaskan penggemar Liga Primer yang hanya dapat menikmatinya melalui layar kaca. Pelaku ketiga, yakni kelompok *stakeholder* selaku pemangku kepentingan dalam Liga Primer yang terklasifikasi dalam dua kategori utama, yakni: komunitas lokal yang terbagi dalam masyarakat dan suporter serta sponsor dan komersial (selain hak siar televisi).

Pemerintah Inggris menerima profit langsung dari subyek-subyek *multiplier effect* melalui pajak sebagai sumber pemasukan utama negara. Jenis-jenis pajak yang dibebankan antara lain: (1) *Income tax* atau Pajak Penghasilan,

(2) *National Insurance*, (3) VAT atau Pajak Pertambahan Nilai, (3) *Corporation tax*, (4) *Council Tax*, (5) *Business rates*, (6) *Excise duties*, (7) pajak lainnya termasuk Stamp Duty, Carbon Tax, Airport Tax, Inheritance Tax, Capital Gains<sup>66</sup>. Pendapatan dari Pajak Penghasilan, *National Insurance*, Pajak Pertambahan Nilai, dan *Corporation Tax* disetorkan langsung pada HMRC (Her Majesty Revenue and Customs) atau Badan Pajak Inggris, sedangkan jenis pajak lainnya akan diterima secara tidak langsung melalui aktivitas *multiplier effect*.

Terdapat pula sumber tak terduga yang muncul dari tingginya angka pajak yang dibebankan apabila klub tidak mampu memenuhinya, yakni hutang. Bank-bank di Inggris dan HMRC menjadi tempat peminjaman dana operasional bagi klub-klub Liga Primer<sup>67</sup>. Secara keseluruhan, jumlah pemasukan yang diterima nantinya akan mempengaruhi nilai angka GDP Inggris. Penyelenggaraan Liga Primer praktis menjadi penggerak *multiplier effect* yang sangat diandalkan oleh pemerintah Inggris.

### 1.6.3 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif, yakni menyajikan hubungan antar variabel penelitian berdasarkan sintesis dari kerangka-kerangka teori yang dirujuk untuk menguji hipotesis<sup>68</sup>.

<sup>66</sup> HM Revenue & Customs, <https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs>

<sup>67</sup> J. Swaine, "Premier League clubs owe public purse £27million in tax", 2010, [online] <http://www.telegraph.co.uk/sport/7930001/Premier-League-clubs-owe-public-purse-27million-in-tax.html> (diakses 5 April 2015)

<sup>68</sup> U. Silalahi, "Metode Penelitian Sosial", 2006

#### **I.6.4 Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup olahraga sepakbola Inggris yang dianggap paling dan telah merepresentasikan topik penelitian ini, yaitu Liga Primer. Liga Primer dipilih mengingat liga nasional ini merupakan kompetisi sepakbola paling populer sekaligus menduduki posisi pertama dalam tiga besar rating program olahraga diikuti oleh olimpiade dan motor balap (F1 dan MotoGP) dari segi popularitas dan siaran televisi global<sup>69</sup>. Arti penting pembatasan ruang lingkup penelitian ini yakni agar pembahasan penelitian terfokus di tengah banyaknya variasi dari olahraga sepakbola di negara Inggris sehingga sasaran eksplanasi penelitian bisa tercapai dan hasilnya dapat disajikan dengan komprehensif. Jangkauan penelitian diambil tahun mulai 2003-2014, sebab pada tahun 2003 adalah tahun awal masuknya investor asing ke Liga Primer (investor Rusia, Roman Abramovich, membeli penuh klub sepakbola Chelsea) yang kemudian diikuti oleh investor asing lainnya. Berangkat di tahun inilah terlihat bagaimana dampak dari dibukanya liberalisasi kepemilikan asing sebagai kelangsungan dari perubahan orientasi kepentingan nasional Inggris dalam Liga Primer, yang semula berorientasi prestise beralih menjadi profit.

#### **I.6.5 Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan, yaitu mengumpulkan data-data sekunder dari berbagai referensi<sup>70</sup>, diantaranya buku, jurnal, artikel-artikel dalam buku/majalah/surat kabar, dokumen pemerintah atau

<sup>69</sup> S. Reeves, "Is Formula One Racing the Most Popular Sport in the World?", 2010, [online] <http://ezinearticles.com/?Is-Formula-One-Racing-the-Most-Popular-Sport-in-the-World?&id=3836509> (diakses 17 November 2014)

<sup>70</sup> Roselle dan Spray, "Research and Writing", 23-28.

makalah yang dipublikasikan, internet, arsip dan laporan, hasil survei yang ada sebelumnya serta referensi lainnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, digunakan dalam menganalisis data-data yang berupa informasi dengan bentuk kumpulan kata atau yang memiliki sifat kualitatif. Data-data ini dihubungkan satu dengan lainnya untuk menunjukkan sebuah kejelasan setelah melalui proses reduksi, penyajian, interpretasi dan seterusnya<sup>71</sup>.

### **I.6.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab. Bab I merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka teori, hipotesis dan metodologi penelitian. Bab II berisi narasi liberalisasi kepemilikan klub Liga Primer yang didasarkan pada prestise nasional terkait di dalamnya dinamika dialektika perdebatan di tiap periode. Selanjutnya pada Bab III menjelaskan arti penting Liga Primer bagi kepentingan nasional Inggris pasca terliberalisasinya kepemilikan klub, mencakup pembahasan lengkap mengenai sumber profit yang didapat oleh Inggris, diawali dengan catatan aliran masuk FDI dan diikuti oleh pengaruhnya terhadap pemasukan pajak dari kontribusi *multiplier effect*, serta perkembangan dinamika prestise tim nasional sepakbola Inggris. Bab IV merupakan analisis dua pilihan penjelasan dari bentuk kelangsungan kepentingan nasional Inggris dalam Liga Primer yang didasari oleh *prestige-oriented* dan *profit-oriented*. Berdasarkan hasil analisis dari Bab IV, kesimpulan dapat dibuat, hipotesis dapat dibuktikan, dan pada Bab V pula dapat diketahui ruang-ruang yang dapat diisi oleh penelitian-penelitian selanjutnya.

---

<sup>71</sup> U. Silalahi, Metode Penelitian Sosial, 311